

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten di Karesidenan Kediri Tahun 2017-2022

Dela Yola Viana^{1*}, Siti Fatimah Nurhayati²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah

Surakarta, Indonesia

✉ b300200288@student.ums.ac.id

Abstrak

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi, upah minimum yang rendah dapat menyebabkan dampak buruk bagi suatu wilayah yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata lama sekolah yang rendah. Faktor Sumber Daya Manusia di karesidenan Kediri yang terus bertambah secara signifikan mampu mempengaruhi terserapnya tenaga kerja agar upah di wilayah tersebut dapat sesuai dengan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besaran pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel independen Terhadap Upah Minimum Kabupaten sebagai variabel dependen di Karesidenan Kediri. Penelitian ini menggunakan data panel tujuh kabupaten/kota selama periode waktu 2017-2022. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika(BPS) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dengan estimasi berdasarkan uji chow dan uji hausman *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB berpengaruh positif terhadap UMK. Sebaliknya, Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap UMK. Penelitian ini diharapkan mejadi Pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat umum tentang pentingnya upah minimum kabupaten dalam penyerapan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Kata Kunci:

Upah Minimum Kabupaten; PDRB; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Tingkat Pengangguran Terbuka

Abstract

The Governor establishes the minimum wage as the lowest monthly wage as a safety net. The Minimum Wage policy has become essential in labor issues in several developed and developing countries. The minimum wage policy was developed by the central government in 2023 as part of a desire to realise workers' and labourers' rights to a decent livelihood for humanity. Workers or labourers, and their families are very dependent on the wages they receive to be able to meet the needs of clothing, food, shelter and other necessities. Low labour force participation rates and the average number of years spent in school are two consequences of a low minimum wage that can be risky to a community. The Human

Resources factor in the Kediri caresidenan which continues to grow significantly is able to influence the absorption of labor so that wages in the region can be in accordance with the standard of living of the community. This study aims to measure the influence of Mean Years School, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Labor Force Participation Rate, and Open Unemployment Rate as independent variables on the District Minimum Wage as the dependent variable in the Kediri Residency. This study uses panel data of seven districts / cities during the 2017-2022 time period. This research data is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of East Java Province. The analysis method used is OLS (Ordinary Least Square) with estimation based on chow test and hausman test Fixed Effect Model (FEM). The results showed that Labor Force Participation Rate, Open Unemployment Rate and GRDP had a positive effect on MSEs. In contrast, Mean Years School has a negative effect on MSEs. This This study will hopefully demonstrate to the government a valuable lesson and the general public about the importance of district minimum wages in labor absorption and welfare.

Keywords: *District minimum wages; GRDP; Labor Force Participation Rate; Open Unemployment Rate*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) No. 18 Tahun 2023 Pasal 1 tentang penerapan upah minimum tahun 2023, Upah Minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak Pekerja/Buruh mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Saat ini pemasalahan yang berkaitan dengan upah masih sama di setiap negara, akan tetapi cara menanggulangnya dan peraturannya berbeda-beda disetiap wilayah atau negara. Para pengusaha, pekerja atau buruh, pemerintah dan masyarakat pada umumnya memiliki kepentingan yang sama dari kebijakan dan sistematika pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarga sangat bergantung pada upah yang diterimanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008:30).

Kebijakan Upah Minimum menjadi pokok permasalahan yang sangat penting dalam ketenagakerjaan di beberapa wilayah atau negara baik negara maju maupun berkembang. Sasaran utama dari kebijakan upah minimum ini adalah pekerja atau buruh untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja tersebut dan keluarganya. Dengan demikian, dapat disimpulkan kebijakan upah minimum adalah:

1. Menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.
2. Dapat meningkatkan produktivitas pekerja.
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan tata cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2009).

Permasalahan upah atau pengupahan sangat menarik dan penting untuk dikaji, karena mengingat banyak ditemukannya pengusaha atau perusahaan memberikan upah yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan serta yang lebih parahnya

lagi pemberian upah dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah kepada buruh atau pekerjanya. Hal tersebut akan menimbulkan dampak yang cukup besar, bukan hanya bagi kelangsungan hidup para buruh maupun pekerja yang semakin jauh dari pemenuhan kebutuhan hidup layak tetapi juga bagi pemerintah yang bertanggungjawab secara penuh untuk dapat mengatasi garis kemiskinan yang disebabkan dari penduduk yang sudah bekerja namun belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena penghasilan yang tidak cukup atau penghasilan dibawah UMK. (Rini,2020).

Tabel 1 menunjukkan bahwa UMK di Karesidenan Kediri dari tahun 2017–2022 selalu mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan Upah Minimum Kabupaten tertinggi yaitu di kota Kediri. Sedangkan rata-rata peningkatan Upah Minimum Kabupaten terendah yaitu di kabupaten Trenggalek. Peningkatan UMK ini terjadi karena nilai kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi di karesidenan Kediri selalu meningkat.

Table 1. Upah Minimum Kabupaten / Kota (Rupiah)

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Upah Minimum Kabupaten / Kota (Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Trenggalek	1.388.850	1.509.816	1.763.268	1.913.322	1.938.322	1.944.933
Kabupaten Tulungagung	1.537.150	1.671.036	1.805.220	1.958.844	2.010.000	2.029.358
Kabupaten Blitar	1.520.920	1.653.383	1.801.406	1.954.706	2.004.706	2.015.071
Kabupaten Kediri	1.576.120	1.713.400	1.850.986	2.008.504	2.033.504	2.043.423
Kabupaten Nganjuk	1.527.410	1.660.445	1.801.406	1.954.706	1.954.706	1.970.006
Kota Kediri	1.617.260	1.758.118	1.899.295	2.060.925	2.085.925	2.118.116
Kota Blitar	1.509.010	1.640.439	1.801.406	1.954.636	2.004.706	1.954.636

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan menggabungkan antara data *time series* (runtut waktu) dan data *cross section* (data silang). Data time series untuk melihat perubahan selama 6 tahun yaitu tahun 2017-2022 dan data cross section untuk melihat perbedaan ruang di tujuh kabupaten/kota di Karesidenan Kediri. Beberapa variabel yang dipakai yaitu Upah Minimum Kabupaten sebagai variabel dependen dan variabel independen yang dipakai ialah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur.

$$\log \text{UMK}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log \text{RLS}_{it} + \beta_2 \text{TPAK}_{it} + \beta_3 \text{TPT}_{it} + \beta_4 \text{PDRB}_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

- β_0 :Koefisien intersep
- Y :Upah Minimum Kabupaten/ Kota (rupiah)
- X_1 :Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
- X_2 :Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
- X_3 :Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
- X_4 :Produk Domestik regional Bruto (milyar rupiah)
- i :Jumlah observasi (Kabupaten/ Kota) di Karesidenan Kediri
- t :Periode (tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi pada model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM). Untuk memilih salah satu model yang tepat perlu dilakukan pengujian dengan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil estimasi pada ketiga model model data panel tersebut ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi CEM, FEM, dan REM

A. CEM				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.48468	0.509619	26.46033	0.0000
LOG(RLS)	-0.014519	0.117174	-0.123911	0.9021
TPAK	0.004203	0.004534	0.926987	0.3599
TPT	0.063261	0.012163	5.200942	0.0000
LOG(PDRB)	0.038035	0.015907	2.391132	0.0220
B. FEM				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.661645	1.325942	3.515723	0.0014
LOG(RLS)	-0.306929	0.740715	-0.414368	0.6815
TPAK	0.004259	0.005242	0.812575	0.4227
TPT	0.023558	0.010930	2.155251	0.0390
LOG(PDRB)	0.968841	0.218573	4.432583	0.0001
C. REM				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.47585	0.337510	39.92726	0.0000
LOG(RLS)	-0.013242	0.077692	-0.170443	0.8656
TPAK	0.004266	0.003002	1.421181	0.1636
TPT	0.063264	0.008017	7.890746	0.0000
LOG(PDRB)	0.038203	0.010558	3.618502	0.0009

Uji Chow adalah Penentuan uji statistik untuk membandingkan antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effects Model* (FEM) sebagai model yang lebih tepat untuk dianalisis pada data panel. Kriteria ketentuan uji chow yaitu apabila probabilitas F-statistik $> \alpha$

(0,05), maka H_0 tidak ditolak, yang berarti bahwa model terpilih adalah CEM untuk dapat mengestimasi data panel. Namun, jika probabilitas F-statistik $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa model terpilih adalah FEM untuk dapat mengestimasi data panel. Hasil Uji Chow dalam penelitian ini menunjukkan bahwa probabilitas cross-section F sebesar 0,000 sehingga H_0 ditolak. Maka model yang terpilih adalah *Fixed Effects Model* (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.044595	(6,31)	0.0000
Cross-section Chi-square	42.495893	6	0.0000

Uji Hausman adalah penentuan uji statistik untuk menentukan model estimasi manakah yang lebih tepat untuk dapat dianalisis pada data panel antara *Random Effects Model* (REM) dan *Fixed Effects Model* (FEM). Ketentuan uji hausman yaitu apabila probabilitas Chi-Square $> \alpha$ (0,05); maka H_0 tidak ditolak, artinya REM adalah model yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Tetapi, jika probabilitas Chi-Square $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak, artinya FEM adalah model yang tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Hasil Uji Hausman pada menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,000 ($< 0,05$), sehingga H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effects Model* (FEM).

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	52.146055	4	0.0000

Setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman dan diperoleh model terpilih, selanjutnya disajikan hasil estimasi pada model terpilih. Model penelitian ini terbukti eksis, dapat dilihat dari nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000 ($< 0,05$). Artinya, secara bersama-sama Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan PDRB berpengaruh terhadap Upah Minimum Kabupaten di Karesidenan Kediri.

Tabel 5. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Model terestimasi

$UMK_{it} = 4.661645 - 0.306929LOG(RLS)_{it} + 0.004259TPAK_{it} + 0.023558TPT_{it} + 0.968841LOG(PDRB)_{it}$			
(0,0000)	(0,0000)	(0,0530)	(0,0473)
$R^2=0,530; DW-Stat=0,945; F-Stat=0,000; Prob.F-Stat=0,000$			

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh 2 variabel yang berpengaruh signifikan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan PDRB karena memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,10.

Tabel 6. Hasil Uji *t*

Variabel	Koefisien	Sig. <i>t</i>	Kriteria	Kesimpulan
Rata-rata Lama Sekolah	-0,013	0,8656	> 0,10	Tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,10$
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,004	0,1636	> 0,10	Tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,10$
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,063	0,0000	< 0,10	Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,10$
PDRB	0,038	0,0009	< 0,10	Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,10$

KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, yakni :

1. Model regresi data panel terbaik yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Dari model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh R^2 sebesar 0,530 atau 53%, sedangkan sisanya 47% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Diperoleh model persamaan hasil terestimasi sebagai berikut :

$$UMK_{it} = 4,661645 - 0,30692 \log RLS_{it} + 0,004259 TPAK_{it} + 0,023558 TPT_{it} + 0,968841 \log PDRB_{it}$$

2. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh 2 variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten tahun 2017-2022 di Karesidenan Kediri yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardista, R. (2020). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Produktivitas Kerja PT. Telkom Cabang Bogor. *Jurnal Parameter*, 195-211.
- Brilliant Primadila, K. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Banjarmasin. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 30-40.
- Daniel Collyn Damanik, R. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Nurtiyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 166-175.
- Nyoman Utama, A. S. (2019). ISSN (P) : 2089-1210, E-ISSN : 25 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 281-291.
- Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Tianggur, S. (2008). Kebijakan Pengupahan di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*.